

SKRIPSI

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Oleh :

RINI SRI PRIYANI

200412007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2024

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh:

RINI SRI PRIYANI

200412007

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan
di hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 17 Mei 2024

Pembimbing I



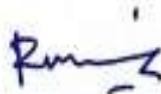
M. IRWAN, SE, MM
NIDN. 1012058301

Pembimbing II



RINA ANDRIANI, SE, M.Si
NIDN.1003058501

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RINA ANDRIANI, SE, M.Si
NIDN.1003058501

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN SKRIPSI**

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh:

RINI SRI PRIYANI
200412007

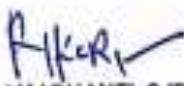
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 17 Mei 2024
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

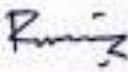
No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Ketua dewan sidang	
2	M. Irwan, SE.,MM	Pembimbing I	
3	Rina Andriani, SE.,M.Si	Pembimbing II /Sekretaris	
4	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Anggota 3	
5	Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak	Anggota 4	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Program Studi Akuntansi


RINA ANDRIANI, SE.,M.Si
NIDN.1003058501

ABSTRAK

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**Rini Sri Priyani
M.Irwan
Rina Andriani**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah yaitu dengan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio efektivitas daerah, rasio belanja operasi, rasio belanja modal dan rasio efisiensi belanja.

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi selama tiga tahun anggaran 2020-2022 adalah Kinerja pendapatan daerah kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari pertumbuhan pendapatan secara umum mengalami penurunan kinerja pendapatan daerah, hal ini ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan pendapatan di setiap tahunnya. Dilihat dari pertumbuhan belanja secara umum mengalami penurunan kinerja belanja daerah, hal ini ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan belanja di setiap tahunnya. Dilihat dari rasio derajat desentralisasi secara umum dapat dikatakan kurang baik dengan kriteria rendah sekali. Dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah secara umum tidak baik dengan kriteria tinggi. Dilihat dari rasio kemandirian daerah secara umum dapat dikatakan tidak baik dengan kriteria rendah sekali. Dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi PAD secara umum dapat dikatakan kurang baik dengan kriteria cukup efektif. Dilihat dari rasio efektivitas pajak daerah secara umum dapat dikatakan kurang baik dengan kriteria kurang efektif. Dilihat dari rasio belanja operasi secara umum dapat dikatakan kurang baik dengan kriteria kurang serasi. Dilihat dari rasio belanja operasi secara umum dapat dikatakan tidak baik dengan kriteria tidak serasi. Dilihat dari rasio efisiensi belanja secara umum dapat dikatakan kurang baik dengan kriteria cukup efisien.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran.

ABSTRACT

REGIONAL FINANCIAL RATIO ANALYSIS IN ASSESSING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE KUANTAN SINGINGI DISTRICT GOVERNMENT

Rini Sri Priyani

M.Irwan

Rina Andriani

The aim of this research is to find out and analyze the financial performance of the Kuantan Singingi district government as measured using regional financial ratio analysis, namely the degree of decentralization ratio, regional financial dependency ratio, regional independence ratio, PAD effectiveness and efficiency ratio, effectiveness ratio regional taxes, operating expenditure ratio, capital expenditure ratio and expenditure efficiency ratio.

Based on the results of this research, it was concluded that the regional financial performance of the regional government of Kuantan Singingi district for the three fiscal years 2020-2022 was that the regional income performance of Kuantan Singingi district, seen from income growth, generally experienced a decline in regional income performance, this was shown by a decrease in income growth each year. Judging from the growth of spending, in general there has been a decline in regional spending performance, this is shown by the decline in spending growth every year. Judging from the ratio of the degree of decentralization in general, it can be said to be not good with very low criteria. Judging from the regional financial dependency ratio, in general it is not good with high criteria. Judging from the regional independence ratio, it can generally be said to be not good with very low criteria. Judging from the ratio of effectiveness and efficiency, PAD can generally be said to be not good with the criteria being quite effective. Judging from the ratio of effectiveness of regional taxes, in general it can be said to be not good with the criteria of being less effective. Judging from the operating expenditure ratio, in general it can be said to be not good with less harmonious criteria. Judging from the operating expenditure ratio, it can generally be said to be not good with the criteria of not being compatible. Judging from the spending efficiency ratio, it can generally be said to be not good with the criteria being quite efficient.

Keywords: Financial Performance, Financial Ratio Analysis, Budget Realization Report.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan Negara merupakan uang yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut merupakan amanat rakyat untuk mewujudkannya, regulasi pengelolaan keuangan Negara diperlukan sebagai pedoman yang berfungsi untuk menjamin keteraturan dan kesesuaian pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Supardan 2020;1).

Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun yang akan datang. Di dalam batang tubuh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian Bab VI pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa daerah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kemudian hal ini ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas kepada daerah yang ditujukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas kepada daerah dalam mewujudkan desentralisasi untuk mengurus daerahnya (Supardan 2020;27).

Menurut Supardan (2020;27) melalui kebijakan otonomi daerah dapat berdampak positif terhadap:

- a. Perkembangan pembangunan ekonomi daerah yang efektif, efisien dan tangguh dengan memberdayakan *stakeholder* dan potensi ekonomi daerah;

- b. Kemajuan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan kualitas hidup melalui sumber daya manusia di daerah yang handal yang mampu mengelola potensi dan kepentingan daerah.

Hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk dapat merealisasikannya diperlukan dukungan sumber daya pendanaan dalam membangun daerah sejalan dengan implementasi desentralisasi. Oleh sebab itu harus disertai juga dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh pemerintah daerah (*good governance*). Menurut Supardan (2020;28) Didalam pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada prinsip-prinsip:

1. *Transparence* (transparansi), yaitu adanya terbukaan dari pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan mengenai keuangan daerah, dan memberikan kebebasan memperoleh informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan keuangan dalam pembangunan daerah.
2. *efficient* (efisien), yaitu setiap pengeluaran anggaran daerah berdasarkan proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan output atau income tanpa mengurangi pelayanan yang optimal kepada publik.
3. *Effective* (efektif), yaitu dalam mengimplementasikan kebijakan keuangan harus tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta realisasi anggaran sesuai dengan rencana pembangunan dan habis terpakai.
4. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah wajib dipertanggung-jawabkan kepada semua elemen masyarakat. Secara institusional pertanggungjawaban dilakukan kepada legislatif (DPRD) sebagai representatif dari masyarakat yang dapat menilai kinerja eksekutif (PEMDA) dengan menggunakan kriteria dan tolok ukur yang bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran.

5. *Participative* (partisipatif), yaitu adanya peran serta langsung atau tidak langsung dari publik dalam memberikan kajian, koreksi/kritikan, dan masukan yang konstruktif terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.

Disamping itu, kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memberi peran yang besar kepada masyarakat dalam wujud pemberdayaan masyarakat dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota, sebab daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonomi yaitu dapat ditunjukkan melalui kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerahnya yakni masing-masing daerah otonom harus dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan terus melakukan usaha untuk mencari dan meningkatkan sumber keuangan yang ada didaerahnya dengan menggali sumber daya asli daerahnya dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasikan dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ditetapkan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, mengoptimalkan mutu jangkauan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sesuatu dasar dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusi PAD terhadap APBD sangatlah besar, semakin besar PAD maka semakin minim suatu daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat. Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.

Sesuai dengan Undang-Undang No 33 tahun 2004 pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah dari pemerintahan pusat. Dana perimbangan itu sendiri terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari Pajak dan Retribusi Daerah, BUMD dan Lain PAD yang sah.

Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun. Pada umumnya, apabila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat setempat yang akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja daerah tersebut. Hal ini membuktikan, semakin banyak belanja modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan. Infrastruktur yang terdapat disuatu daerah diharapkan akan mampu menciptakan efisiensi pada berbagai sektor, produktivitas masyarakat meningkat

sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Pemerintah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat harus menyampaikan laporan keuangan daerahnya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas kinerjanya, dimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengungkapkan bahwa didalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat didalam anggaran.pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja yang ada didalamnya. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Namun masih banyak pihak yang belum dapat memahami atau membaca laporan keuangan tersebut dengan baik. Hal ini merupakan hal yang wajar, sebab berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda atau bahkan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh sebab itu diperlukan analisis laporan keuangan dengan banyak metode-

metode dan salah satunya yang sering digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Analisis laporan keuangan ialah suatu usaha untuk dapat mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode ke periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat menilai pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tersebut.

Didalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan perusahaan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena didalam instansi pemerintahan tidak berorientasi pada laba seperti tujuan perusahaan pada umumnya. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Berikut merupakan gambaran perkembangan APBD pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi selama tiga (3) tahun terakhir anggaran :

Tabel 1.1
Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022

Struktur APBD	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah	1.449.814.113.991	1.347.161.271.589	1.313.503.378.951
Pendapatan Asli Daerah	73.950.440.456	95.230.632.831	87.909.018.160
Pendapatan Transfer	1.329.586.583.534	1.207.522.128.758	1.225.481.414.608
Belanja Daerah	1.144.764.794.635	1.029.986.132.737	1.004.264.839.539
Belanja Operasi	953.105.707.346	906.599.182.521	899.783.751.493
Belanja Modal	161.270.005.084	118.985.719.427	104.750.740.286
Surplus/(Defisit)	35.960.818.822	63.303.289.270	55.564.364.933

Sumber : BPKAD Data Olahan Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa pendapatan daerah pemerintah kabupaten Kuantan Singingi lebih besar diperoleh dari dana perimbangan atau dana transfer dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan transfer sebesar 1.329.586.583.534 ditahun 2020, dan mengalami penurunan ditahun 2021 yaitu sebesar 1.207.522.128.758, dan mengalami kenaikan ditahun 2022 sebesar 1.225.481.414.608. Dan Pendapatan Asli Daerah 73.950.440.456 ditahun 2020, dan meningkat ditahun 2021 sebesar 95.230.632.831 dan mengalami penurunan sebesar 87.909.018.160 ditahun 2022. Ini menunjukkan bahwa kabupaten Kuantan Singingi masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan menggali sumber daya asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan pemerintah kabupaten Kuantan Singingi sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunannya.

Dan belanja daerah kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa belanja rutin (operasi) 953.105.707.346 ditahun 2020, 906.599.182.521 ditahun 2021, dan 899.783.751.493 ditahun 2022, meskipun dalam tiga tahun terakhir sudah mengalami penurunan hal ini masih lebih besar dibandingkan dengan belanja

modal (pembangunan) yaitu sebesar 161.270.005.084 ditahun 2020, 118.985.719.427 ditahun 2021, dan 104.750.740.286 ditahun 2022. Sama halnya belanja operasi tiap tahun menurun maka belanja modal pun menurun. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Kuantan Singingi yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk memenuhi atau pemenuhan aktivitas pemerintah dan belum dapat memperhatikan pembangunan daerahnya.

Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonomi yaitu dapat ditunjukkan melalui kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah yakni masing-masing daerah otonom harus dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan terus melakukan usaha untuk mencari dan meningkatkan sumber keuangan yang ada di daerahnya dengan menggali sumber daya asli daerah. Ditetapkan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, mengoptimalkan mutu jangkauan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Dana perimbangan atau dana transfer memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencapaian efisiensi dan keseimbangan dalam memberikan layanan jasa publik, dikarenakan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana Pendapatan yang diperoleh dari pusat selalu menggambarkan ketergantungan daerah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pemerintah pusat yang berakibat menurunnya kinerja keuangan. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) merupakan sesuatu dasar dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusi PAD terhadap APBD sangatlah besar, semakin besar PAD maka semakin minim suatu daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat.

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.

Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun. Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat setempat yang akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja daerah tersebut. Hal ini membuktikan, semakin banyak belanja modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan. Infrastruktur yang terdapat disuatu daerah dapat diharapkan nantinya akan mampu menciptakan efisiensi pada berbagai sektor, produktivitas masyarakat meningkat sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Sehubungan dengan diperolehnya kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Hasil pemeriksaan atas LKPD tersebut merupakan WTP untuk yang ke-12 kalinya diraih oleh pemerintah daerah Kuantan Singingi secara berturut. Hal tersebut tentunya menjadi pertimbangan seperti apa kinerja keuangan daerah kabupaten Kuantan Singingi jika diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah (kuansing.go.id).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Siregar (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu ialah terkait lokasi penelitian kemudian jenis rasio yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan 5 rasio keuangan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan. sedangkan penelitian ini menggunakan 8 rasio keuangan yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Belanja Modal, Rasio Belanja Operasi dan Rasio Efisiensi Belanja, penelitian Siregar (2020) ini dilakukan pada kota Tebing Tinggi, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis pendapatan selama periode tahun 2020-2022?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis belanja selama periode tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis pendapatan selama periode tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis belanja selama periode tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dalam berfikir, dan memperluas pengetahuan baik dalam teori maupun praktek . dan tentunya mampu untuk mengembangkan akuntansi sektor publik terkhusus dalam menilai kinerja keuangan pada pemerintahan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan berfikir, memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek untuk mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Bagi Universitas Islam Kuantan Singingi, sebagai informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan memperdalam mengenai masalah penelitian ini dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya masalah tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang di ukur melalui rasio keuangan daerah maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari analisis pendapatan didapatkan hasil kesimpulan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 dilihat dari pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan rata-rata -5%, berdasarkan rasio derajat desentralisasi kriteria rendah sekali rata-rata 6%, dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah kriteria tinggi sekali rata-rata 92%, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah kriteria rendah sekali rata-rata 7%, dilihat dari rasio efektivitas PAD kriteria cukup efektif rata-rata 77%, dilihat dari rasio efektivitas pajak daerah kriteria kurang efektif rata-rata 71%.
2. Berdasarkan dari analisis belanja didapatkan hasil kesimpulan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 dilihat dari pertumbuhan belanja mengalami penurunan rata-rata -8%, berdasarkan rasio belanja operasi kriteria kurang serasi rata-rata 87%, dilihat dari rasio belanja modal kriteria tidak serasi rata-rata 12%, dilihat dari rasio efisiensi belanja kriteria cukup efisien rata-rata 87%.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedepannya, antara lain:

1. Sebaiknya Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah

agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir. Sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut didapatkan antara lain: di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Apabila pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.

2. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Pemerintahan daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan PAD, baik dari pajak daerah dan lainnya dengan cara melakukan intensifikasi PAD yaitu memperbesar penerimaan PAD dengan melakukan pemungutan yang lebih giat, teliti dan ketat.
3. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
4. Disarankan untuk peneliti selanjutnya, agar menjadi acuan dan peneliti yang menyarankan agar peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan

keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 3 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit STIM YPKN.
- Mardiasmo. 2013. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Prasetya, E.G. 2021. *Penyusunan Dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. ANDI : Yogyakarta.
- Subramanyam, K.R. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V., Wiratna. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika.
- Supardan, Herry. 2020. *Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah*. MNC: Malang.

Jurnal/Skripsi :

- Abdul, Wachid. 2013. Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 747-752.
- Ardila, I. dan A.A. Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 15(1): 79.
- Dewi, E. P. 2018. Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2).
- Dewi, M. S., N. A. S. Dharmawan, Dan D. N. S. Werastuti. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangli). *Jurnal Akuntansi*. 3 (1).
- Fathah, R. N. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Lubis, Putri Kemala Dewi, Dan Nurlia Hafni. 2017. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Tahun Anggaran 2011–2013.” Kitabah 1 No 1(2017): 20–45.

Mahbur,P,S. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Soppeng).Jurnal Riset Edisi III 004.

Mentari Yosephen Sijabat, C. S. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012. Jurnal Administrasi Publik (Jap), 2(2), 236–242.

Pilat , Morasa. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015. Vol 6 No 1 (2017).

Pramono, J. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, 7(13).

Ridwan,musi'd. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Kota Jambi). Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.12 No.2, 2019 Hal. 222-241.

Sari, Saragih, Lenny Menara, Indonesia. 2018. Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2018): Jurnal Mutiara Akuntansi Volume 3 No. 2 Tahun 2018.

Siregar,Azila,I. 2020. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah. 2007. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 32 Tentang Pemerintah Daerah.

Website :

<https://kuansing.go.id/id/blog/kabupaten-kuansing-kembali-raih-wtp-yang-ke-12-dari-bpk-ri-provinsi-riau>.